

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL SASINDO UNPAM

VOLUME 4 NO. 1, NOVEMBER 2023

DISKRIMINASI DAN RESISTENSI PENGANUT AGAMA LOKAL: KAJIAN RUANG PASCAKOLONIAL TERHADAP CERPEN *ORANG-ORANG DI SELATAN HARUS MATI MALAM ITU* KARYA FAISAL ODDANG

M. Faiz Hakim Nazri

Alumni Sasindo Unpam dan Mahasiswa Magister Ilmu Sastra Universitas Gadjah Mada
mfaizhakimnazri@gmail.com

Diterima: 15 November 2023

Direvisi: 19 November 2023

Disetujui: 24 November 2023

ABSTRAK

Sejak Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, agama-agama lokal semakin tersisihkan oleh dominasi agama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Artikel ini membahas isu diskriminasi dan resistensi yang dihadapi oleh penganut agama lokal Towani Tolotang di dalam cerpen *Orang-orang di Selatan Harus Mati Malam Itu* karya Faisal Oddang. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan pascakolonial yang secara spesifik memanfaatkan teori ruang pascakolonial yang digagas oleh Sara Upstone dalam buku *Spatial Politics in the Postcolonial Novel* (2009). Dalam konsepsinya, Upstone menetapkan struktur koherensi yang mendasari sebuah ruang. Struktur tersebut terdiri atas; ruang (space), tempat (place), overwriting, batasan-batasan (border), kekacauan (chaos), dan pasca-ruang (post-space). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Berdasarkan hasil analisis, cerpen OSHMII menunjukkan bahwa negara masih mempertahankan wacana kolonial dalam pengaturan agama. Hal itu bisa dilihat dari peraturan yang dikeluarkan negara yang kemudian digunakan sebagai border untuk menekan penganut Towani Tolotang. Konstruksi ruang yang demikian menuntut homogenitas, keajegan, serta kestabilan yang pada gilirannya melahirkan dua bentuk resistensi. Pertama melalui perjalanan, perpindahan tempat. Kedua dengan mencantumkan nama agama resmi di kolom KTP, tetapi tetap menjalankan praktik Towani Tolotang dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Diskriminasi, Resistensi, Agama Leluhur, Pascakolonial, Towani Tolotang*

ABSTRACT

*Since Indonesia's independence from Dutch colonialism, local religions have increasingly been marginalized by the domination of official religions established by the government. This article discusses the discrimination and resistance faced by adherents of the local religion Towani Tolotang in Faisal Oddang's *Orang-orang di Selatan Harus Mati Malam Itu*. This study was carried out with a postcolonial approach, which explicitly utilizes postcolonial space theory initiated by Sara Upstone in her book *Spatial Politics in the Postcolonial Novel* (2009). In her conception, Upstone establishes a coherent structure that underlies a space. The structure consists of space, place, overwriting, borders, chaos, and post-space. The*

method used in this study is a qualitative method, which produces descriptive data in the form of written words. Based on the analysis results, the OSHMMI short story shows that the state still maintains colonial discourse for regulating religion. It can be seen from the regulations issued by the state, which were then used as a border to suppress Towani Tolotang adherents. Such spatial construction demands homogeneity, constancy, and stability, giving rise to two forms of resistance. Firstly, through travel, moving places. Second, by including the name of the official religion in the KTP column but still carrying out the Towani Tolotang practice in daily life.

Keywords: *Discrimination, resistance, local religion, postcolonial, Towani Tolotang*

PENDAHULUAN

Pengaturan terkait dengan agama pernah dilakukan oleh pihak kolonial Belanda (Baso, 2005). Saat itu, pengawasan terhadap agama diinisiasi oleh seorang sarjana Belanda yang kemudian menjadi Penasihat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda, Christiaan Snock Hurgronje. Setelah meletusnya pemberontakan di Banten pada 1888, Snock menganggap agama harus dikontrol sebab jika kelompok beragama menjadikan agama sebagai kendaraan politik, itu akan mengganggu kelancaran sistem kolonial. Fenomena tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab eksistensi agama di Indonesia yang tidak pernah lepas dari kontrol berlebihan negara. Hal demikian bisa dilihat dari lahirnya berbagai kebijakan mengenai agama. Kebijakan yang terus keluar juga menjadi penanda bahwa selama ini agama sering menjadi sasaran politisasi.

Masyarakat Nusantara sebenarnya memiliki lebih banyak sistem kepercayaan. Namun, pasca kemerdekaan dan terbentuknya Indonesia, negara secara formal hanya mengakui enam agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan terakhir Konghucu (Qoyim, 2004). Agama yang diakui negara kemudian dilabeli sebagai ‘agama resmi’. Penetapan status itu menyebabkan siapapun yang tidak memeluk satu dari enam agama resmi disebut telah melanggar otoritas negara. Realitas demikian rupanya membuat para penganut agama lokal yang berbasis pada aliran kepercayaan dipandang sebagai anak tiri. Bahkan, pada masa Orde Baru, setelah penetapan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pelarangan PKI dan Penyebaran Ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme, orang-orang di luar agama resmi sering dianggap komunis dan digolongkan ke dalam pengkhianat negara.

Di Sulawesi Selatan, setelah ditetapkannya TAP MPRS No. XXV/1966, dikenal tiga operasi militer yang bekerja sama dengan salah satu Organisasi Islam yang menasar penganut agama lokal. Salah satu operasi yang dimaksud bernama *Mappakainge* atau *Malilu Sipakainge* yang menyapu para penganut agama lokal Towani Tolotang (Syamsurijal & Nasurung, 2019). Towani Tolotang merupakan agama yang dianut oleh sebagian warga Sidenreng Rappang yang diwariskan secara turun-temurun melalui beberapa jalur: keturunan dan konvensi agama (Jubba, 2016).

Peristiwa operasi tersebut direpresentasikan oleh Faisal Oddang dalam cerpen yang berjudul *Orang-orang di Selatan Harus Mati Malam Itu* (Selanjutnya disingkat *OSHMMI*). Seperti dikatakan (Hariyono & Nurhadi, 2020), salah satu kekuatan Oddang terlihat dari bagaimana dia memanfaatkan orang-orang *liyan* yang kemudian menimbulkan anomali dan juga alur cerita yang dihubungkan dengan peristiwa sejarah Sulawesi Selatan. Cara yang

dilakukan Oddang itu kemudian sejalan dengan yang dikatakan Nurgiantoro (2015) terkait dengan terciptanya karya sastra, yakni disebabkan oleh adanya masalah kehidupan (dalam hal ini terkait perlakuan negara terhadap penganut Towani Tolotang) yang tidak sesuai dengan harapan pengarang sehingga pengarang kemudian mencoba menawarkan sesuatu yang diidealkan. Atau, kalaupun tidak menawarkan sesuatu yang diidealkan, pengarang setidaknya memberitahu efek-efek dari peristiwa sejarah yang kemudian kita semua bisa belajar darinya.

Dalam OSHMMI, Oddang menghadirkan tokoh Isuri dan Uwak yang merupakan bagian dari Towani Tolotang. Mereka berdua adalah representasi dari korban operasi *Malilu Sipakainge*. Operasi tersebut menggunakan batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah sebagai alat legitimasinya. Batasan itu tidak hanya berfungsi sebagai *Ideological State Aparatus*, tetapi pada tahap yang lebih jauh, menjadi *Repressive State Aparatus*. Dalam kamus Altusharian, jika yang pertama mekanismenya lebih *soft*, meminta penganut Towani Tolotang mengikuti aturan melalui gerakan kebudayaan dan pendidikan yang sifatnya hegemonik; maka yang kedua lewat cara-cara represif, mengandalkan operasi militer.

Dengan begitu, mengharuskan penganut Towani Tolotang memeluk agama resmi merupakan salah satu cara untuk mengkonstruksi masyarakat agar selaras dengan kehendak negara. Akibatnya, mereka akan kehilangan hak memeluk kepercayaan yang sejatinya sudah dijamin dalam ayat-ayat konstitusi. Selain itu, efek dari operasi *Malilu Sipakainge* juga membuat eksistensi identitas penganut Towani Tolotang jadi termarjinalkan. Oleh karena itu dengan melihat fenomena bahwa negara melanjutkan praktik kolonial dalam pengaturan agama, baik yang bersifat hegemonik maupun represif, maka muncul pertanyaan terkait bagaimana para penganut agama yang dimaksud bisa bertahan atau bahkan keluar dari tekanan negara.

Untuk mengetahui adanya diskriminasi dan upaya resistensi yang dilakukan penganut Towani Tolotang dalam OSHMMI, penelitian ini akan memanfaatkan kajian pascakolonial sebagai pendekatannya. Dalam Day dan Foulcher (2008), pascakolonialisme dianggap sebagai fenomena sosial, budaya, dan politik yang muncul setelah periode penjajahan kolonial berakhir. Adapun dalam kajian sastra, pendekatan pascakolonial secara umum membicarakan bagaimana teks-teks sastra dengan berbagai caranya mengungkapkan jejak-jejak perjumpaan kolonial, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara, yang telah membentuk sebagian yang signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman imperialisme Eropa (Aschroft, Griffiths, & Tiffin, 2003: xxxviii). Dengan demikian, istilah ‘poskolonialisme’ dalam kajian sastra digunakan sebagai strategi pembacaan yang akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu dalam mengidentifikasi adanya jejak-jejak kolonialisme dalam karya sastra.

Jika tadi dijelaskan OSHMMI menggunakan kajian pascakolonialisme sebagai pendekatannya, maka sekarang diperlukan konsep teoretis untuk mendeduksikan masalahnya. Teori yang dibutuhkan terutama teori pascakolonial yang terkait khusus dengan permasalahan ruang. Dalam penelitian ini, teori yang akan dimanfaatkan adalah politik ruang pascakolonial yang digagas oleh Sara Upstone dalam buku *Spatial Politics in the Postcolonial Novel* (2009). Bagi Upstone, dalam ruang pascakolonial masih tersisa jejak-jejak wacana kolonial walaupun secara fisik penjajahan telah berakhir. Dia juga menegaskan bahwa dalam ruang yang demikian selalu terdapat pergeseran ruang yang melahirkan adanya resistensi jika unsur

politis dari masing-masing ruang diungkap. Secara spesifik, pergeseran tersebut meliputi ruang bangsa, ruang perjalanan, ruang kota, ruang rumah, dan terakhir ruang tubuh (Upstone, 2009).

Ruang Pascakolonialisme Upstonian

Sejauh ini, ruang memiliki tendensi untuk dianggap sebagai media yang cair, kosong, atau alamiah, sehingga membuka kemungkinan untuk dimaknai kembali melalui proses *overwriting*. Istilah *overwriting* atau timpa-tulis pertama kali digunakan dalam pendahuluan *The Post-colonial Studies Reader* (1994) untuk menegaskan wilayah yang terus menerus ditulis, ditimpa oleh penjajah (dalam Upstone, 2009: 6). Pemaknaan atas ruang akan menghasilkan apa yang kita kenal dengan istilah tempat (*place*). Proses pemaknaan yang dilakukan pihak kolonial bertujuan untuk mengganti fluiditas ruang dengan wacana absolutisme. Akan tetapi, sebagaimana semangat wacana dekonstruksi, usaha penghapusan itu selalu meninggalkan jejak. Teks yang asli masih ada di sana, membuat realitas menjadi berlapis.

Dalam bukunya, Upstone lebih lanjut menjelaskan strategi kontrol kolonial yang menggunakan konsep batas (*border*). Untuk memuluskan proses timpa-tulis, pihak kolonial memperkuatnya dengan batasan-batasan (*border*) sebagai sesuatu yang tetap, absolut, dan alamiah. Tujuannya agar masyarakat terjajah menjadi homogen dan mudah dikontrol. Sebab, selain besarnya ruang yang diperoleh, pihak kolonial juga menginginkan adanya produktivitas dan stabilitas politik dari ruang tersebut (Upstone, 2009: 4). Oleh karenanya, kekacauan dalam jenis dan model apapun tidak akan dikehendaki oleh pihak kolonial. Untuk membendung itu, maka mereka membuat sebuah *border*, misalnya dengan ketetapan hukum.

Sedangkan, dalam pandangan pascakolonial, ruang bersifat cair, berbeda dengan sinkronisasi dan idealisasi versi kolonial (Upstone, 2009: 11). Kecairan ruang kemudian dielaborasi oleh Upstone dalam karya-karya penulis pascakolonial. Dalam karya-karya yang dimaksud, penulis pascakolonial menciptakan ruang sebagai tempat berbagai kemungkinan dan resistensi, yang bertujuan merebut kembali kecairan ruang yang ditolak oleh kolonial melalui batasan-batasan tadi dengan mengungkapkan fungsi politis dari setiap ruang (Upstone, 2009: 11). Itu artinya, penulis pascakolonial ingin mengungkapkan *chaos* yang ada, serta menunjukkan adanya resistensi dan perlawanan terhadap gagasan ruang yang dikonstruksi oleh kolonial.

Pandangan pascakolonial melihat bahwa ruang berisi suara-suara heterogen, yang memiliki keragaman pengalaman yang menekankan pada perbedaan dan subjektivitas (Upstone, 2009: 13). Suara-suara dan pengalaman demikianlah yang melahirkan *chaos*. Menginterogasi keadaan chaos dilakukan dalam upaya membongkar pandangan absolutisme yang secara halus ditanamkan oleh konsep kolonial dalam *border*; yang pada akhirnya memunculkan *post-space*. Istilah *post-space* sejatinya ingin menunjukkan bahwa kekacauan spasial dalam segala skala bisa menjadi sumber daya yang berguna untuk melihat kembali posisi masyarakat pascakolonial dan isu-isu identitas yang menyertainya serta, kemungkinan-kemungkinan yang melekat pada ruang pascakolonial sebagai akibat dari sejarah hibrid mereka (Upstone, 2009: 15).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah dan teori yang telah dibentangkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Mekanisme penelitian dengan metode kualitatif nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pengamatan terhadap teks sebagai lokusnya. Objek material penelitian ini adalah teks karya sastra berbentuk cerpen OSHMMI yang terdapat dalam buku *Sawerigading Datang dari Laut* (2019) karya Faisal Oddang. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Menurut (Faruk, 2012), analisis data merupakan perpanjangan dari pikiran manusia karena fungsinya bukan untuk mengumpulkan data, melainkan untuk mencari hubungan antardata yang tidak akan pernah dinyatakan sendiri oleh data yang bersangkutan. Analisis teks OSHMMI dilakukan dengan berpijak pada teori ruang pascakolonial untuk menemukan wacana kolonial yang masih bertahan dalam sebuah ruang serta resistensi dari subjek tertentu yang ada di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Ruang dalam Cerpen OSHMMI

Cerpen *Orang-Orang di Selatan Harus Mati Malam Itu* merupakan karya sastra yang mengisahkan perjuangan penganut agama lokal Towani Tolotang dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara terkait kebebasan beragama. Kata “selatan” merujuk pada orang-orang Tolotang yang berdasarkan kesepakatan harus menempati bagian Selatan Sidenreng(Jubba, 2016b). Di samping itu, OSHMMI juga sekilas menarasikan keikutsertaan masyarakat Sulawesi Selatan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari cengkraman penjajah. Tokoh yang mewakili perjuangan tersebut ialah Upe. Dalam sebuah kilas balik, diceritakan Upe berjanji kepada Isuri bahwa setelah tugas membela negara usai, dia akan menemani Upe mengabdikan kepada Dewata. Akan tetapi, kenyataan yang didapati berbeda. Upe yang telah tergabung dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, mengikuti langkah pemimpinya bergabung dalam satu panji NII Kartosoewijo untuk menyerukan perlawanan terhadap pemerintah yang dulu dibantunya.

Perlawanan tersebut hadir atas dasar kekecewaan kerana ditolak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia. Penolakan itu dianggap sebagai bagian dari *siri napacce* dalam konsep budaya Bugis-Makassar. Dianggap *siri* karena mereka merasa harga dirinya diinjakinjak oleh pemerintah yang tidak menghargai perjuangan mereka. Sementara *pacce/passe* sebagai bentuk perasaan sedih-sepenanggungan dengan teman seperjuangan dalam menanggung rasa malu (Sahajuddin et al., 2019: 53).

Sekalipun pernah kau katakan bahwa setelah **tugasmu membela negara selesai**, kau akan kembali menemaniku mengabdikan pada Dewata, kenyataan yang kudapati sungguh berbeda; kau harus membunuhku dan aku tidak pernah lagi bertanya apakah kau masih mencintaiku atau tidak setelah malam tujuh Agustus 1954. Malam yang tidak akan kulupakan. **Tepat setahun ketika pimpinanmu—dan kau, tentu saja, sebagai bagian Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan menyerukan perlawanan terhadap pemerintah.** Sungguh, tidak perlu kau jelaskan alasannya; **aku tahu kalian ditolak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia. Semua itu jelas, kau, dan kawanmu yang lain tak lolos administrasi.** Kau sendiri yang bercerita padaku sehari

sebelum kau ikut berjuang keluar-masuk hutan. Ada yang perlu kau jelaskan melebihi semuanya, ada yang masih terus mengganggu hingga pada pelarianku menjauhi maut aku masih terus bertanya; bukankah kita saling mencintai, **kenapa kau ingin membunuhku tanpa alasan yang dengan mudah bisa kumengerti? Apakah hanya karena Tuhanku dengan Tuhan yang diakui negara kita berbeda?**(Oddang, 2019: 26).

NII lahir dari kekecewaan Kartosoewirjo terhadap pemerintah pusat Indonesia dalam merumuskan cita-cita bangsa. Cita-cita ruang bangsa serta *border* yang dibayangkan oleh Kartosoewirjo ialah negara yang berlandaskan Islam. Sedangkan yang terjadi, sebagaimana konstitusi yang dirumuskan para *founding* saat itu, negara mendasarkan pada sekularisme. Keadaan demikian berkembang menjadi intrik politik yang rumit, yang menimbulkan situasi *chaos* antara aparaturnegara dan kelompok-kelompok tertentu di Sulawesi Selatan. Hal itu sekaligus menandakan bahwa ruang bangsa yang dicita-citakan seluruh masyarakat Indonesia belum tercapai, sebab negara belum mampu memfasilitasi heterogenitas bangsa.

Di kalimat terakhir pada kutipan di atas, Upe yang pada mulanya memusuhi negara, kemudian seakan-akan menjadi memusuhi keluarga narator yang merupakan penganut Towani Tolotang yang teguh. Dari keadaan tersebut kemudian peneliti menarik kesimpulan bahwa tekanan yang dialami oleh para penganut Towani Tolotang tidak hanya datang dari negara, tetapi juga datang dari pihak lain. Mereka adalah orang-orang yang tergabung ke dalam kelompok DI/TII. Alasan kelompok DI/TII memusuhi penganut Tolotang, yang paling memungkinkan, karena keyakinan Tolotang melenceng dari garis-garis Islam. Tapi kemudian, ketika kelompok DI/TII berhasil ditumpas, tekanan yang dialami penganut Towani Tolotang lebih banyak dilakukan oleh negara.

Diskriminasi Terhadap Penganut Towani Tolotang

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tekanan yang didapatkan oleh penganut Towani Tolotang datang dari dua pihak: negara dan kelompok DI/TII. Negara direpresentasikan oleh segerombolan tentara, sedangkan kelompok DI/TII diwakili oleh Upe. Cerpen ini dimulai dengan kedatangan segerombolan tentara ke kediaman Uwak untuk membujuknya supaya meninggalkan Towani Tolotang yang telah dianut secara turun-temurun. Tentara yang datang menghendaki keluarga Uwak memeluk agama resmi dengan mencantumkanannya di KTP. Itu artinya tentara juga memaksa keluarga Uwak untuk meninggalkan Tuhan mereka yang disebut *Dewata Sawwae*.

Kami dipaksa menganut agama resmi, mencantumkanannya di KTP, dan dipaksa menjauhi Tuhan kami— Dewata Sewwae, tentu kami tidak berdaya lantas harus menerimanya dengan dada lapang yang perih. Jumat, pada akhir tahun enam puluhan, pada siang yang hujan, segerombol tentara mendatangi Uwak—tetua yang dipercaya akan menyelamatkan orang Tolotang saat hidup dan setelah mati. Aku bergegas menuju bilik.

“Uwak harus memilih, atau hak sebagai warga negara tidak kalian dapatkan, bisa saja diusir, bisa saja ada yang bertindak di luar kendali, Uwak sudah tahu sendiri, bukan, apa yang terjadi?” (Oddang, 2019: 25).

Dalam kutipan dialog di atas, strategi pendisiplinan yang dilakukan oleh tentara tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan dengan struktur tindakan yang sifatnya menekan

melalui ancaman. Dengan menawarkan pilihan yang sama-sekali tidak menguntungkan, para tentara menghendaki penganut Towani Tolotang untuk memeluk agama resmi. Dalam dialog “*uwak harus memilih, atau hak sebagai warga negara tidak kalian dapatkan*” mengindikasikan bahwa sebuah aturan digunakan sebagai *border* bagi penganut Towani Tolotang. Di sini sah atau tidaknya mereka sebagai warga negara ditentukan oleh agama apa yang mereka pilih. Dengan menggunakan aturan tersebut, negara juga mencoba melakukan *overwriting* terhadap masyarakat Sidenreng Rempang supaya hanya memeluk agama yang telah diresmikan negara. Kemudian kalimat “*sudah tahu sendiri, bukan, apa yang terjadi?*” merujuk ke kejadian-kejadian sebelumnya, di mana para penganut Towani Tolotang pada akhirnya menjadi korban persekusi.

Persekusi tidak hanya dilakukan oleh aparat negara saja. Dalam OSHMMI, kelompok pemberontak DI/TII juga digambarkan melakukan persekusi terhadap penganut Towani Tolotang. Mereka bahkan digambarkan menggunakan kekerasan langsung seperti pemukulan dan pembakaran terhadap rumah-rumah masyarakat.

Aku tidak ingin ada korban lagi. *Dewata Sewwae* begitu mencintai kita, sehingga Ia menguji seberapa kuat kita bertahan, Uwak pernah mengatakan itu padaku pada suatu malam, di dalam hutan, **saat pelarian kami menjauhi pasukan gerilya yang membakar kampung kami**. Di antara pasukan itu, ada kau salah satunya, Upe, lelaki yang berjanji akan menikahiku setelah kemerdekaan berhasil direbut dari tangan penjajah (Oddang, 2019: 26).

Akhirnya kekasihku pulang, gumamku dalam hati. Belum selesai kurayakan kebahagiaan itu dengan cara berdiam menatap wajahmu yang tirus dan lekang—belum habis kutatapi bola matamu yang tidak sejernih dulu, **sesuatu menghunjam dadaku. Kau memoporku dan begitu aku terhuyung-terempas ke lantai papan, kulihat kau mulai mengarahkan moncong senapanmu ke tubuhku**. Sekilas kulihat beberapa anak buahmu mengintip di celah jendela (Oddang, 2019: 27).

Narasi kutipan pertama merupakan suara hati Isuri ketika melihat ayahnya, Uwak, mendapat tekanan dari tentara. Isuri berharap Uwak menyetujui usulan para tentara agar meninggalkan Tolotang dan memeluk agama resmi. Di saat yang bersamaan Isuri kemudian mengingat masa ketika mereka melakukan pelarian menjauhi “pasukan gerilya” yang telah membakar kampungnya. Pasukan gerilya yang dimaksud ialah kelompok DI/TII. Dalam narasi kutipan kedua, kelompok DI/TII yang diwakili oleh Upe kemudian melakukan pemukulan terhadap Isuri. Di situ Upe juga sempat mengarahkan moncong senapannya ke tubuh Isuri walaupun tembakannya sengaja dipelesetkan.

Dari kedua kasus di atas bisa dilihat bahwa tidak ada pengakuan terhadap agama lokal. Ketiadaan pengakuan akan Towani Tolotang menjadikan para penganutnya rentan menghadapi serangan. Dalam OSHMMI mereka digambarkan menghadapi serangan dari dua arah sekaligus, dari negara dan dari kelompok DI/TII. Serangan yang awalnya berasal dari stigma yang terus dikonstruksi baik secara struktural maupun kultural dan, pada akhirnya mendiskriminasi para penganut Towani Tolotang.

Resistensi dan Pasca-Ruang

Tindakan berbeda dari kedua aktor di atas bisa dilihat bahwa mereka menginginkan stabilitas dan homogenitas. Tetapi kemudian Uwak menolak untuk memilih salah satu agama

resmi yang ditawarkan negara melalui tentara. Uwak bahkan balik mengancam akan mengusir mereka dari kediamannya. Tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya resistensi, karena tanpa KTP mereka tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

“Uwak, ayo jawab!”

Aku tersentak, Uwak dibentak dengan keras oleh tentara itu. Aku jelas mendengarnya dan hal itu melamurkan ingatanku tentangmu dan malam yang memisahkan kita itu, Upe.

Setelah tiga belas tahun, kini kami seluruh penganut kepercayaan Tolotang harus kembali berhadapan dengan keresahan-keresahan dan ingatan-ingatan mengerikan.

Tentang aroma daging bakar dan anyir darah yang tercecer di sekitar rongsokan bekas pembakaran rumah, dan tentang sungai yang ikannya tidak ingin dimakan penduduk sekitar karena dipercaya memakan daging manusia.

“Kalian siapa?” balas Uwak dengan bentakan, “sopan santun bertamu belum tahu, ha? Ini rumah saya, sopanlah. Atau saya usir?” (Oddang, 2019: 30).

Resistensi yang datang dari Uwak sebagai penganut Towani Tolotang nantinya menghasilkan kekacauan (*chaos*). Kekacauan adalah keadaan di mana negara dan penganut agama lokal berkontestasi dengan segala bentuk. Kekacauan menyebabkan terjadinya instabilitas politik di dalam ruang Sidenreng Rempang (Upstone, 2009). Oleh karena itu, dalam sudut pandang negara, kekacauan merupakan hal yang harus dihindari. Sementara, dalam optik Upstonian, kekacauan merupakan hal baik karena dapat membongkar batas-batas homogenitas yang ditetapkan oleh negara.

Dalam OSHMMI, kekacauan yang terjadi antara negara (tentara) dan penganut Towani Tolotang (Uwak) termediasi oleh Isuri. Di samping sebagai mediator, Isuri juga menjadi kekacauan itu sendiri. Sebab darinya lahir ide alternatif sebagai solusi ketegangan yang terjadi antara tentara dan Uwak. Pada saat terjadi penolakan dari Uwak, tentara kemudian memberikan waktu agar Uwak bisa memutuskan pilihannya. Tentara mengatakan akan kembali dengan membawa berkas untuk diteken. Dalam rentang waktu itulah Isuri hadir sebagai kekacauan.

“Cukup, Uwak,” ucapku terbata-bata di sela tangisan, “turuti saja mereka itu, jangan korbankan siapapun, sudah cukup. Lagipula Dewata Sewwae tidak peduli KTP kita, Uwak. Agama apa pun yang ada di KTP, selama kita menyembah dan beragama dengan cara Tolotang, tidak akan jadi masalah.”

“Pikirlah dulu, Isuri,”

“Tapi, Uwak—”

“Saya belum selesai,” sanggah Uwak, “lebih baik ditembaki tentara daripada dibunuh orang-orang di kampung ini. Lebih baik menodai aturan pemerintah daripada menodai agama orang lain, paham?” (Oddang, 2019: 32).

Kami akan menikah, dia akan datang, dan jika kita tidak mengikuti pemerintah, artinya kita cacat administrasi. Pernikahan kami akan susah, orang kampung tidak akan sepakat, dan kami tidak akan tenang, Uwak. Kumohon, mengertilah, memilihlah. Aku membujuk (Oddang, 2019: 34).

Dalam kutipan dialog di atas, Isuri mencegah Uwak supaya tidak lagi menolak kemauan tentara yang datang. Dia berpikir bahwa jika Uwak menolak ajakan bergabung

dengan agama resmi, akan ada korban lagi. Isuri kemudian menyampaikan ide alternatif mengenai kemungkinan yang bisa mereka tempuh untuk sampai pada kondisi pasca-ruang. Situasi pasca-ruang adalah kondisi saat subjek penganut agama lokal berada pada suatu ruang atau konstruksi yang berada di luar kuasa negara (Upstone, 2009). Isuri memberi tahu kepada Uwak bahwa agama apapun yang tercantum di KTP, selama mereka menyembah dan beragama dengan cara Towani Tolotang, tidak akan jadi masalah.

Tetapi saat Isuri menawarkan ide tersebut, Uwak masih ragu. Dia takut jika mereka memilih bergabung dengan salah satu agama resmi, akan ditolak, sebab agama mereka telah mendapat stigma buruk dari masyarakat penganut agama resmi. Uwak mengangap “lebih baik menodai aturan pemerintah daripada menodai agama orang lain”. Di situasi ini kemudian Isuri menggunakan strategi lain dengan membohongi Uwak. Dia mengatakan bahwa Upe yang telah lama menghilang, akan datang. Mereka akan menikah. Jika tidak mengikuti anjuran pemerintah, pernikahan mereka akan cacat secara administratif sehingga membuat orang-orang kampung tidak sepakat. Dami kebahagiaan dan melihat putri semata wayangnya hidup tenang bersama sang pasangan, akhirnya Uwak luluh.

Hujan belum berhenti. Sebentar lagi tentara itu datang, dan kami harus memilih.

“Pilih saja, Uwak,” bujukku.

“Mau berjanji?”

“Apa pun, demi Uwak, demi Dewata Sewwae.”

“Apa pun agama di KTP, kita harus tetap Tolotang.”

Kami sepakat, dan ketika tentara datang, Uwak tidak banyak bicara sebelum dan setelah menekan surat pernyataan (Oddang, 2019: 33).

Dengan menekan surat pernyataan, itu artinya Uwak menjadi subjek yang dikonstruksi oleh negara. Adapun ide yang diajukan Isuri menunjukkan sesuatu yang hibrid, yaitu praktik terjadinya percampuran konstruksi. Dalam catatan administratif negara, mereka mengikuti apa yang dikonstruksikan. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap menjalankan praktik Towani Tolotang. Tindakan dari perwujudan ide alternatif Isuri kemudian membawa mereka pada yang lebih luas, yaitu ruang ketiga.

KESIMPULAN

Ruang Sulawesi Selatan, khususnya daerah Sidenreng Rempang dikonstruksi oleh Oddang sebagai ruang pascakolonial karena bagian dari negara Indonesia, yang mana di dalamnya masih terdapat *place* dan *border* yang diwarisi oleh konstruksi kolonial. Negara Indonesia menuntut adanya kestabilan serta homogenitas dalam sistem politik dan keagamaan. Akibatnya agama lokal di sana, Towani Tolotang, menjadi objek pendisiplinan yang berujung pada diskriminasi penganutnya. Akan tetapi melalui tokoh Isuri, Uwak, dan Upe, Oddang menghadirkan situasi *chaos* untuk menunjukkan bahwa dia berusaha menginterogasi batas-batas yang telah dibangun.

Sementara itu, ruang alternatif yang ditawarkan oleh Oddang dalam OSHMMI tidak hanya resistensi terhadap batas-batas yang telah dikonstruksi dan sepenuhnya terjebak dalam wacana kolonial. Memang keluarga Uwak pada akhirnya menekan surat pernyataan untuk memilih salah satu agama resmi. Tapi dalam praktik keseharian, mereka tetap menjalankan keyakinan sebagaimana Towani Tolotang. Situasi ini menjadikan mereka berada dalam kedua

ruang; lokal dan negara. Kesatuan dari kedua ruang itu menghadirkan ruang lain, yang disebut sebagai ruang ketiga.

REFERENSI

- Aschroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2003). *Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Poskolonial*. Qalam.
- Baso, A. (2005). *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (1st ed.). Penerbit Mizan.
- Day, T., & Foulcher, K. (2008). Bahasan Postkolonial dalam Sastra Indonesia Modern. In *Clearing a Space: Sastra Indonesia Modern Kritik Postkolonial* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia dan KITLV.
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal* (1st Edition). Pustaka Pelajar.
- Hariyono, S., & Nurhadi. (2020). Hierarki Kebutuhan Tokoh Utama dalam Dua Cerpen Faisal Oddang. *Sawerigading*, 26(1), 19–31.
- Jubba, H. (2016a). Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2).
- Jubba, H. (2016b). Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 179–186. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.744>
- Nurgiantoro, B. (2015). *Teori Pengkajian Fiksi* (11th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Oddang, F. (2019). *Sawerigading Datang dari Laut*. DIVA Press.
- Qoyim, I. (2004). Agama dan Pandangan Hidup Masyarakat Towani Tolotang. In *Religi lokal & pandangan hidup kajian tentang masyarakat penganut religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Permalim), samanisme dan agama Jawa Sunda*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).
- Sahajuddin, Hafid, A., & Hafid, R. (2019). Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah Lisan. *International Seminar on Conflict and Violence: Historical Reconstructions and Cultural Resolutions*, 49–67.
- Syamsurijal, & Nasurung, M. F. L. (2019, August). Menekuk Agama Lokal; Nalar Kekerasan dalam Regulasi yang Mengatur Kepercayaan Towani-Tolotang. *International Seminar on Conflict and Violence: Historical Reconstructions and Cultural Resolutions*.
- Upstone, S. (2009). *Spatial Politics in The Postcolonial Novel*. Ashgate Publishing Company.